



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 3763-3770

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Kebijakan Ekonomi Publik terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia

Riva Aprilia Rofiqoh, Hendra Riofita

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
rivaapriliarofiqoh11@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Abstrak

Penelitian Studi ini meneliti analisis kebijakan ekonomi publik terhadap tingkat pengangguran di Indonesia, untuk mengevaluasi sejauh mana intervensi pemerintah telah meningkatkan situasi ketenagakerjaan nasional. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, studi ini meneliti berbagai sumber primer, seperti jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi terkait, untuk menyajikan analisis komprehensif tentang pola pengangguran di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran bersifat struktural, didorong oleh ketidaksesuaian keterampilan, produktivitas rendah, dan kesenjangan akses pekerjaan di berbagai wilayah. Kondisi ini memiliki dampak luas pada kesejahteraan sosial, stabilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas pembangunan secara keseluruhan. Studi ini menyoroti peran penting kebijakan ekonomi publik dalam membentuk dinamika pasar tenaga kerja dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Instrumen kebijakan seperti stimulus anggaran, insentif investasi, dan program pengembangan kompetensi telah terbukti efektif dalam menghasilkan lapangan kerja baru dan menjangkau kelompok rentan. Namun, keberhasilannya ditentukan oleh kualitas implementasi, sinkronisasi antar sektor, dan adaptasi pemerintah terhadap fluktuasi ekonomi global dan domestik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik, adaptif, dan jangka panjang untuk memaksimalkan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah disarankan untuk memprioritaskan pengembangan sektor-sektor unggulan seperti manufaktur, ekonomi digital, dan pertanian berteknologi tinggi, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kejuruan. Selain itu, menciptakan lingkungan investasi yang lebih mendukung sangat penting untuk ekspansi ekonomi, yang akan secara berkelanjutan menyerap angkatan kerja dan secara signifikan mengurangi pengangguran berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Publik, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi

1. Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang sering menjadi fokus perhatian pemerintah dalam perekonomian Indonesia karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Pengangguran merupakan indikator penting kondisi pasar tenaga kerja dan stabilitas ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pengangguran tetap menjadi perhatian utama karena dapat memicu kemiskinan, mengurangi produktivitas nasional, dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi publik, khususnya kebijakan fiskal, untuk mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja. [1]

Pengangguran adalah masalah ekonomi besar yang dapat memicu konsekuensi sosial yang krusial, termasuk peningkatan kejahatan. Hal ini sering terjadi karena individu yang menganggur kehilangan pendapatan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. [2]

Kebijakan ekonomi publik mencakup regulasi pajak, pengeluaran pemerintah, dan program pembangunan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pengeluaran pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan investasi publik, berfungsi sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, kebijakan pajak memengaruhi iklim investasi dan kapasitas produksi, yang pada gilirannya berdampak pada permintaan tenaga kerja.

Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Pengeluaran pemerintah telah terbukti efektif dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja,

sementara stabilitas kebijakan makroekonomi juga memengaruhi keputusan investasi yang terkait dengan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, menganalisis pengaruh kebijakan ekonomi publik terhadap tingkat pengangguran sangat penting sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. [3]

Dengan adanya masalah diatas peneliti ingin meneliti analisis kebijakan ekonomi publik terhadap tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan temuan studi terkini, sehingga memberikan gambaran empiris tentang keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas pasar tenaga kerja.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka, dengan mengeksplorasi berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik utama. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi kata kunci utama, pemilihan sumber terkait, dan analisis konten dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademis, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian. Setiap sumber dinilai berdasarkan kualitas informasinya, kedalaman analisis, dan relevansinya dengan masalah penelitian.

Data yang dikumpulkan kemudian diorganisasikan secara kronologis dan disusun untuk memudahkan pemahaman peneliti tentang hubungan antar konsep. Analisis dilakukan melalui interpretasi, perbandingan, dan penarikan kesimpulan dari berbagai temuan. Pendekatan ini tidak hanya merangkum teori tetapi juga membangun kerangka analitis yang komprehensif, memperkuat argumen, dan memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk diskusi dan kesimpulan penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Pengertian Ekonomi Publik dan Pengangguran

Ekonomi publik terdiri dari dua kata kunci yaitu ekonomi dan publik. Ekonomi merujuk pada semua kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Sementara itu, publik membahas isu-isu yang melibatkan kepentingan dan kesejahteraan banyak orang. Dapat disimpulkan, ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkaji peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian. [4]

Indonesia adalah negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya angka pengangguran. Setiap tahun, angka pengangguran di Indonesia melebihi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap seluruh angkatan kerja secara optimal, terutama karena ketidaksesuaian keterampilan, lambatnya penciptaan lapangan kerja, dan tekanan ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan di banyak sektor. [5]

Masalah utama dan mendasar di sektor ketenagakerjaan Indonesia adalah tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah pekerja baru yang jauh melebihi pertumbuhan lapangan kerja yang tersedia setiap tahunnya. Pengangguran merupakan masalah sosial yang serius karena menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, yang terpaksa berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi akibat pengangguran sudah jelas, tetapi tidak ada jumlah uang yang dapat sepenuhnya mengganti dampak psikologis dan kemanusiaan yang dialami oleh mereka yang terkena dampak pengangguran. [6]

3.2. Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran adalah suatu kondisi di mana individu dalam angkatan kerja yaitu, orang-orang usia produktif yang secara fisik, mental, dan fisik mampu bekerja tidak menemukan pekerjaan atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan, meskipun mereka bersedia, siap, dan aktif mencari pekerjaan. Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan seseorang untuk terserap dalam perekonomian, baik karena mereka belum menemukan pekerjaan, sedang mencari posisi yang sesuai, sedang menunggu hasil lamaran atau panggilan wawancara, atau saat ini menganggur tetapi tetap dalam status siap kerja. Singkatnya, pengangguran terjadi ketika seseorang mampu dan ingin bekerja, tetapi tidak menemukan peluang kerja selama periode tertentu.

Pengangguran mengacu pada orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari seminggu, atau mengalami kesulitan menemukan pekerjaan yang layak. Umumnya, pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan pekerjaan. Masalah ini sering mengganggu perekonomian dengan mengurangi produktivitas dan pendapatan, yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya.

Oleh karena itu, pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi empat jenis utama yaitu sebagai berikut pengangguran friksional (normal) yang disebabkan oleh individu yang mencari pekerjaan yang lebih baik, Pengangguran siklikal yang timbul dari penurunan aktivitas ekonomi atau rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian, pengangguran struktural yang timbul dari perubahan struktur aktivitas ekonomi, pengangguran teknologi yang terjadi karena penggantian pekerja oleh teknologi canggih. [7]

Pengangguran berdasarkan cirinya terbagi menjadi empat yaitu pertama pengangguran terbuka, jenis pengangguran ini terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja melebihi penciptaan lapangan kerja, sehingga banyak individu menjadi pengangguran total. Dalam jangka waktu yang lama, ini menjadi pengangguran total, suatu situasi yang dikenal sebagai pengangguran terbuka, di mana seseorang tidak sepenuhnya dan secara signifikan dipekerjakan. Kedua pengangguran terselubung, baik di negara maju maupun negara berkembang, seringkali terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja di satu sektor, yang mengakibatkan penurunan produktivitas, khususnya di sektor pertanian dan jasa. Misalnya, sebuah keluarga petani sibuk bekerja di lahan yang terbatas dan terfragmentasi, dengan beberapa anggota keluarga tidak memiliki tugas produktif dan membuang waktu luang mereka ini adalah pengangguran terselubung. Ketiga pengangguran musiman, jenis pengangguran ini sering terjadi di bidang pertanian dan perikanan karena variasi musiman atau kondisi cuaca yang menghambat aktivitas kerja, seperti hujan lebat yang menghambat penyadapan karet atau angin kencang yang mencegah nelayan berlayar. Petani juga mengalami masa tenang antara penanaman dan panen; jika tidak ada pekerjaan alternatif pada saat itu, mereka mengalami pengangguran musiman. Keempat pengangguran terselubung, urbanisasi yang cepat tanpa adanya kekurangan lapangan kerja yang sepadan telah menyebabkan sebagian migran perkotaan menjadi pengangguran total, sementara yang lain hanya bekerja dalam jam yang sangat terbatas. Mereka bekerja di luar jam kerja normal, misalnya, hanya beberapa hari dalam seminggu atau beberapa jam sehari, sehingga termasuk dalam kategori pengangguran terselubung.[8]

3.3. Faktor-Faktor Terjadinya Pengangguran di Indonesia

Upah minimum merupakan faktor penting yang memengaruhi tingkat pengangguran di suatu wilayah. Upah yang ditetapkan pemerintah berdampak pada keputusan perekrutan perusahaan. Jika pemerintah menurunkan upah minimum, biaya tenaga kerja perusahaan akan lebih rendah. Hal ini mendorong perusahaan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga meningkatkan lapangan kerja.

Sebaliknya, kenaikan upah minimum menyebabkan lonjakan biaya produksi bagi perusahaan. Mengingat upah merupakan komponen kunci dari struktur biaya, hal ini dapat menjadi beban finansial. Untuk menjaga stabilitas biaya dan efisiensi operasional, perusahaan sering mengurangi perekrutan atau menunda perluasan tenaga kerja. Akibatnya, kenaikan upah minimum berpotensi mengurangi jumlah pekerja yang terserap, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, upah minimum merupakan elemen kunci yang membentuk dinamika pasar tenaga kerja, baik dari perspektif biaya perusahaan maupun peluang kerja bagi masyarakat. [9]

Tingkat pengangguran bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhinya hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Inflasi, volume investasi, dan pertumbuhan ekonomi adalah tiga pilar fundamental makroekonomi yang memiliki pengaruh mendalam dan saling terkait terhadap volatilitas tingkat pengangguran suatu negara. Ketiga elemen ini tidak hanya membentuk dasar stabilitas pasar tenaga kerja tetapi juga menentukan arah dinamika ketenagakerjaan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Pertama, inflasi yang terus-menerus seringkali menjadi musuh utama kelangsungan bisnis suatu perusahaan. Kenaikan harga yang tidak terkendali pada berbagai komponen biaya produksi seperti bahan baku, pasokan energi, upah tenaga kerja, dan biaya logistik dan distribusi memaksa manajemen untuk mengadopsi strategi pengurangan biaya yang ketat. Hal ini biasanya terwujud melalui PHK massal, pembekuan perekrutan baru, atau bahkan penundaan program pengembangan sumber daya manusia. Lebih lanjut, inflasi melemahkan daya beli masyarakat umum karena depresiasi mata uang yang terus-menerus, yang mengakibatkan penurunan drastis permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Akibatnya, perusahaan terpaksa mengurangi produksi, menutup jalur

produksi yang tidak efisien, dan secara tidak langsung mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja tambahan. Fenomena ini menciptakan siklus setan di mana pengangguran meningkat, yang pada gilirannya semakin menekan konsumsi dan memperburuk situasi ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, volume investasi bertindak sebagai katalis utama, secara signifikan mendorong perekonomian. Ketika arus modal kuat dari investor domestik dan asing, ini membuka peluang signifikan untuk penciptaan bisnis baru, pembangunan fasilitas produksi modern seperti pabrik-pabrik canggih, dan proyek infrastruktur skala besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, yang mempekerjakan ribuan pekerja. Investasi tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung melalui konstruksi dan operasi tetapi juga merangsang inovasi teknologi dan meningkatkan produktivitas. Meskipun kemajuan dalam otomatisasi dan robotisasi terkadang menggantikan pekerjaan manual yang berulang, dampak positifnya jauh lebih signifikan: ekspansi produksi besar-besaran, diversifikasi industri baru, seperti dalam teknologi hijau atau ekonomi digital, dan efek pengganda yang menyebar melalui rantai pasokan terkait semuanya berkontribusi pada pengurangan signifikan dalam tingkat pengangguran.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) riil adalah cerminan paling langsung dari kesehatan ekonomi nasional. Ketika pertumbuhan mencapai tingkat yang stabil dan positif, perusahaan menuai keuntungan yang lebih tinggi dari peningkatan penjualan, yang mendorong mereka untuk meluncurkan ekspansi bisnis, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan sejumlah besar lapangan kerja baru untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Pertumbuhan yang kuat juga berdampak positif pada pendapatan per kapita, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli secara keseluruhan. Peningkatan konsumsi ini menciptakan permintaan agregat yang lebih tinggi untuk barang konsumsi, jasa, dan bahkan barang modal, yang semuanya membutuhkan tenaga kerja tambahan di berbagai sektor. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya mengurangi pengangguran friksional dan struktural tetapi juga mendorong inklusi sosial dengan menciptakan peluang kerja yang lebih adil.

Pada dasarnya, ketiga faktor makroekonomi ini inflasi, volume investasi, dan pertumbuhan ekonomi berinteraksi dalam jaringan kompleks yang membentuk pasar tenaga kerja suatu negara. Inflasi yang tinggi dapat menghambat investasi dan memperlambat pertumbuhan, sementara investasi yang rendah menekan pertumbuhan dan membuka pintu bagi inflasi. Sebaliknya, sinergi positif antara ketiganya dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh, di mana pengangguran tetap terkendali dan prospek kesejahteraan publik lebih cerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bijaksana dalam mengelola ketiga elemen ini merupakan kunci untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami kontribusi masing-masing faktor terhadap perubahan tingkat pengangguran sehingga strategi yang tepat dapat dirumuskan untuk mengatasinya. [10]

3.4. Dampak Permasalahan Pengangguran di Indonesia

Permasalahan yang terus dirasakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, pengangguran menciptakan berbagai masalah serius yang membebani masyarakat luas. Tanpa pekerjaan, banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan utama mereka, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Situasi ini memperburuk tingkat kemiskinan dan mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Secara psikologis, para pengangguran sering menghadapi tekanan mental seperti stres, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri. Lebih jauh lagi, pengangguran memicu masalah sosial seperti peningkatan kejahatan, konflik keluarga, dan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan produktif. Karena kendala keuangan, anak-anak berisiko putus sekolah, sementara keluarga kesulitan mengakses layanan kesehatan. Secara keseluruhan, pengangguran adalah masalah kritis yang secara langsung merusak kesejahteraan sosial. [11]

Tingkat pengangguran di Indonesia merupakan permasalahan yang terus muncul sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, keterbatasan lapangan kerja, perubahan struktur ekonomi, serta perkembangan teknologi yang menggantikan peran tenaga manusia. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga banyak angkatan kerja tidak terserap secara optimal. Selain itu, faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan, dan tidak meratanya distribusi lapangan kerja antarwilayah semakin memperburuk situasi pengangguran. Dengan demikian, pengangguran menjadi masalah publik yang memerlukan campur tangan kebijakan ekonomi pemerintah secara langsung, karena pengaruhnya tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga sosial, mulai dari menurunnya kesejahteraan hingga meningkatnya potensi kriminalitas. [12]

Pendidikan yang berkualitas pasti menghasilkan lulusan yang unggul, yang secara signifikan berdampak pada tingkat pengangguran. Jika kualitas pendidikan rendah, misalnya karena fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, interaksi yang kurang optimal dengan dosen, atau kurikulum yang tidak sesuai dengan tuntutan industri, lulusan seringkali kekurangan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan. Akibatnya, mereka kesulitan bersaing di pasar kerja dan rentan terhadap pengangguran. Sebaliknya, pendidikan yang baik dan relevan dengan bisnis akan membekali lulusan dengan keterampilan yang tepat, meningkatkan peluang kerja, dan secara drastis mengurangi pengangguran. [13]

Pengangguran tidak hanya berdampak pada perekonomian tetapi juga memberikan tekanan signifikan pada kesehatan mental dan psikologis masyarakat luas. Individu yang kehilangan pekerjaan sering mengalami gangguan emosional seperti kecemasan berkepanjangan, depresi, dan hilangnya kepercayaan diri yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Faktor pemicu utamanya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti biaya makanan, pendidikan anak, atau tagihan rumah tangga, ditambah dengan kurangnya rutinitas produktif yang biasanya memberikan rasa pencapaian dan pengembangan diri. Kondisi ini sering memicu konflik dalam rumah tangga, seperti pertengkaran antar anggota keluarga atau bahkan peningkatan kasus perceraian, terutama jika pencari nafkah utama tiba-tiba kehilangan sumber pendapatan tetap. Lebih lanjut, studi psikologis menunjukkan bahwa pengangguran jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan zat atau perilaku impulsif sebagai mekanisme penanggulangan yang tidak sehat, sehingga memperburuk kualitas hidup secara keseluruhan.

Dari perspektif makroekonomi, pengangguran menyebabkan penurunan drastis dalam output nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika sebagian besar potensi tenaga kerja tidak terserap ke dalam pasar tenaga kerja, kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa menurun tajam, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pengangguran juga menekan pendapatan per kapita, melemahkan daya beli, dan menurunkan standar hidup. Pendapatan negara dari sektor pajak juga terkikis karena aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan investasi tidak berjalan optimal. Misalnya, pajak penghasilan, PPN, dan pajak cukai telah menyusut karena transaksi yang rendah. Akibatnya, pendanaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, listrik, dan irigasi menjadi terbatas, sementara layanan publik seperti subsidi kesehatan dan pendidikan juga terdampak. Secara global, negara-negara dengan tingkat pengangguran tinggi, seperti Yunani setelah krisis 2008, telah mengalami resesi berkepanjangan, menunjukkan bagaimana pengangguran dapat menciptakan siklus setan yang merusak stabilitas fiskal.

Lebih lanjut, pengangguran memperburuk masalah kemiskinan struktural dalam masyarakat. Tanpa sumber pendapatan yang stabil, kelompok rentan seperti keluarga miskin perkotaan, petani subsisten, dan pekerja informal semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, akses ke pendidikan berkualitas, dan perawatan kesehatan preventif. Contoh nyata terlihat di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020, di mana pengangguran melonjak akibat pandemi COVID-19, disertai dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5%. Situasi ini menciptakan hubungan sebab-akibat dua arah: pengangguran memicu kemiskinan, sementara kemiskinan menghambat pengembangan keterampilan baru yang dibutuhkan untuk kembali bekerja. Di daerah pedesaan seperti ini, dampaknya diperparah oleh kurangnya diversifikasi ekonomi, yang menjebak banyak rumah tangga dalam siklus kemiskinan antar generasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia juga menegaskan bahwa selama pandemi, angka kemiskinan nasional meningkat dari 9,22% pada tahun 2019 menjadi 10,19% pada tahun 2020, sebagian besar didorong oleh gelombang PHK massal.

Terakhir, pengangguran secara signifikan berkontribusi pada peningkatan ketidaksetaraan pendapatan di berbagai kelompok sosial. Individu yang menganggur kehilangan akses sepenuhnya terhadap upah atau pendapatan tetap, sementara pekerja formal yang beruntung terus menikmati stabilitas keuangan yang relatif. Ketidaksetaraan ini memperlebar jurang antara kaya dan miskin, dengan koefisien Gini, ukuran ketidaksetaraan pendapatan, cenderung memburuk. Jika pengangguran struktural berlanjut dalam jangka waktu yang lama, tuntutan kenaikan upah minimum bagi pekerja yang tersisa menjadi sulit dipenuhi karena perusahaan menghadapi tekanan pada biaya produksi, yang pada gilirannya memicu ketegangan sosial seperti protes buruh. Struktur ekonomi juga menjadi rentan terhadap guncangan eksternal, seperti inflasi atau krisis global, yang menghambat upaya pembangunan yang adil seperti program redistribusi lahan atau bantuan sosial. Di Indonesia, misalnya, indeks Gini nasional, yang mencapai 0,388 pada tahun 2022, mencerminkan bagaimana pengangguran pasca-pandemi telah memperdalam ketidaksetaraan sosial, sehingga memerlukan intervensi kebijakan seperti pelatihan kejuruan dan insentif usaha kecil untuk memutus rantai dampak negatif. [14]

3.5. Solusi Adanya Dampak Pengangguran di Indonesia

Ketika orang-orang melihat peluang nyata dan percaya bahwa risiko dapat dikelola secara efektif, mereka cenderung lebih merekomendasikan layanan atau sistem tersebut kepada orang lain. Dalam situasi pengangguran, peluang yang dirasakan dan kemampuan untuk mengelola risiko juga memengaruhi kemauan orang untuk bekerja atau memulai bisnis. Semakin tinggi peluang yang dirasakan dan semakin rendah risiko yang dirasakan, semakin kuat motivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterlibatan angkatan kerja, dan mengurangi pengangguran. [15]

Kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi pengangguran melalui berbagai langkah konkret. Pemerintah telah mendorong investasi untuk mendorong perusahaan menciptakan lapangan kerja baru, membangun infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan untuk memfasilitasi distribusi barang dan pertumbuhan bisnis, menyediakan pelatihan keterampilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan industri, dan mendukung UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Lebih lanjut, pemerintah telah menyederhanakan birokrasi untuk memulai bisnis dan meningkatkan iklim investasi untuk menarik investor domestik dan asing, sehingga menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata, bahkan di daerah terpencil. Namun, kebijakan-kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dan lowongan yang tersedia, terbatasnya posisi tetap atau pegawai negeri sipil, dan ketidakmerataan kesejahteraan di seluruh pulau dan provinsi, yang menyebabkan distribusi lapangan kerja yang tidak merata.

Meskipun kebijakan-kebijakan ini telah terbukti efektif dalam mengurangi pengangguran, masalah-masalah mendasar yang kompleks belum sepenuhnya teratasi. Pengangguran menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, seperti penurunan pendapatan negara, rendahnya penerimaan pajak, melemahnya daya beli, yang berdampak pada perdagangan yang lesu, dan kesulitan dalam membangun industri baru karena kurangnya investasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif, dengan penekanan pada pelatihan keterampilan pekerja yang selaras dengan tuntutan industri modern, pemerataan kesempatan kerja di daerah-daerah terbelakang di luar Jakarta, mendorong inovasi untuk mengembangkan bisnis baru seperti startup, dan memperkuat sektor padat karya seperti pariwisata, pertanian berteknologi tinggi, dan industri manufaktur. Dengan perbaikan berkelanjutan dan pengawasan ketat, pengangguran dapat dikurangi secara efektif, perekonomian nasional akan diperkuat, dan kesejahteraan pekerja akan terwujud [16]. Strategi pengelolaan pengangguran dapat diimplementasikan melalui serangkaian langkah holistik, dimulai dengan pengembangan keterampilan pekerja melalui pelatihan komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar regional, sehingga menghasilkan keterampilan yang lebih tepat dan kompetitif. Pemerintah harus membuka pintu peluang kerja dengan mendorong kemajuan UMKM melalui pendampingan komunitas dan inisiatif pemberdayaan, serta memfasilitasi akses pendanaan bagi pengusaha muda melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau fasilitas inkubasi startup. Lebih lanjut, peningkatan arus investasi asing dan lokal, pembangunan infrastruktur vital seperti jalan tol dan pelabuhan, bersama dengan program lapangan kerja massal pemerintah, dapat menampung pekerja dalam skala besar dan responsif. Optimalisasi pendidikan kejuruan dan perancangan kurikulum sekolah dasar dan menengah untuk memastikan kemampuan kerja segera, yang diperkuat oleh kolaborasi yang solid antara pemerintah, universitas, industri, dan kelompok masyarakat, merupakan elemen penting untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inovatif. Integrasi kebijakan-kebijakan ini, yang didukung oleh pemantauan dan penilaian efektivitas secara berkala, diproyeksikan tidak hanya akan mengurangi pengangguran secara substansial tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga melalui peningkatan upah dan ketahanan ekonomi. [17]

Studi ini mengungkapkan bahwa daya tarik pasar Islami, yang dibentuk oleh estetika, transparansi, kepercayaan, dan keandalan, tidak hanya meningkatkan retensi konsumen Muslim tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Kenyamanan konsumen yang mendorong pembelian berulang akan meningkatkan volume transaksi digital, sehingga memicu kebutuhan akan pekerja tambahan di berbagai lini operasional platform. Semakin tinggi retensi konsumen, semakin banyak karyawan yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis, termasuk staf operasional, staf layanan pelanggan, manajer toko, pemasar digital, perancang konten, fotografer produk, dan analis data. Sebaliknya, UMKM fesyen Muslim yang bergabung dengan pasar akan mengalami lonjakan permintaan, yang menyebabkan perekrutan lebih banyak penjahit, pekerja produksi, staf pengemasan, dan tim distribusi.

Hal ini menunjukkan bahwa perluasan pasar Islami secara langsung membuka peluang kerja di sektor digital dan kreatif. Penciptaan lapangan kerja ini memainkan peran penting dalam mengurangi pengangguran, karena menargetkan kelompok rentan seperti lulusan baru, perempuan yang bekerja dari rumah, dan pekerja informal

yang telah beralih ke ekosistem digital. Oleh karena itu, keberhasilan pasar Islami dalam menarik dan mempertahankan konsumen bukan hanya strategi bisnis tetapi juga katalisator bagi penciptaan lapangan kerja baru, yang berkontribusi pada penurunan angka pengangguran. [18]

4. Kesimpulan

Kesimpulannya, Secara umum ekonomi publik memainkan peran penting dalam memahami bagaimana pemerintah mengatur dan membentuk perekonomian, termasuk mengatasi pengangguran, yang masih menjadi masalah utama di Indonesia. Pengangguran tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi, inflasi, kurangnya investasi, dan ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan industri. Situasi ini diperparah oleh pertumbuhan angkatan kerja yang melampaui penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengangguran adalah masalah publik yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur. Dampak pengangguran sangat luas, meliputi dimensi ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, pengangguran menghambat produktivitas nasional, mengurangi pendapatan negara, mengurangi penerimaan pajak, dan melemahkan daya beli, memperlambat aktivitas perdagangan. Secara sosial, pengangguran memicu stres, kecemasan, penurunan kualitas hidup, dan bahkan meningkatkan potensi kejahatan. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya mengakibatkan hilangnya pekerjaan tetapi juga akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan yang memadai. Masalah ini semakin diperparah oleh ketidakmampuan sistem pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten yang memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja, sehingga menyulitkan banyak pencari kerja untuk bersaing. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk UMKM guna menciptakan lapangan kerja baru. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan ini terhambat oleh tantangan seperti ketidaksesuaian keterampilan, akses yang tidak merata terhadap pekerjaan di berbagai wilayah, dan birokrasi yang tidak efisien. Selain itu, perkembangan ekonomi digital melalui pasar syariah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan peluang kerja baru. Peningkatan retensi konsumen telah mendorong perluasan platform, yang secara langsung meningkatkan kebutuhan akan pekerja di sektor operasional, pemasaran, layanan pelanggan, dan produksi UMKM. Tren ini menegaskan bahwa inovasi dan digitalisasi dapat menjadi pendorong utama penciptaan lapangan kerja, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, pekerja informal, dan lulusan baru. Dengan demikian, pertumbuhan pasar syariah tidak hanya memperkuat ekosistem bisnis digital tetapi juga memberikan kontribusi signifikan untuk mengurangi pengangguran. Pada dasarnya, mengurangi pengangguran di Indonesia membutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan kolaborasi intensif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia bisnis, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan publik mendukung penciptaan lapangan kerja inklusif, sementara pendidikan harus menghasilkan lulusan yang relevan dan siap kerja. Sementara itu, sektor swasta diharapkan berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk memperluas kesempatan kerja. Melalui sinergi yang solid dan pemanfaatan optimal peluang ekonomi modern, Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi pengangguran dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, lebih produktif, dan lebih kompetitif.

Referensi

- [1] A. Hartanti, A. D. Basriwijaya, and H. V. Munthe, "ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA AKIBAT PERUBAHAN INFLASI DI INDONESIA PADA TAHUN 2019/2023," *J. Ekon. Manaj. dan akuntansi*, vol. 1192, pp. 573–584, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.kolibri.org/index.php/neraca/article/view/2626>
- [2] H. C. Rahayu, "Ekonomi Bisnis Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *J. Inform.*, vol. 5, pp. 77–85, 2023, doi: 10.37034/infob.v5i1.198.
- [3] H. Muttaqim, "Analisis Komprehensif Pengaruh Pengeluaran Pemerintah , Inflasi , Suku Bunga , dan Investasi terhadap Tingkat Pengangguran Musiman dalam Sektor Pertanian di Indonesia Comprehensive Analysis of the Effect of Government Expenditures , Inflation , Interest R," *J. Teknol. dan Manaj. Ind. Pertan.*, vol. 5, pp. 195–205, 2024, [Online]. Available: https://tekper.uho.ac.id/index.php/t/article/download/6/21?_cf_chl_tk=656pxlBKA36AyYmndWEEm.X_ArEJhBiZwcbxbMEDV6l0-1778306131-1.0.1.1-3JDWdKqLigmtMk1pCcBEoFchrT1.pORYmeMYMUTtvr4
- [4] M. Viona, D. G. Katanging, W. Pangestoeti, U. Maritim, and R. Ali, "Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara : Perspektif Ekonomi Publik," *J. Penelit. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 02, no. June, 2025, [Online]. Available: <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1938/2094>
- [5] C. F. Salim, F. Aditiya, and Arifudin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia," *Chang. Think J.*, vol. 3, pp. 84–91, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/changethink/article/view/1127>
- [6] U. R. S. Al and M. Yasin, "Analisis Pengangguran dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perekonomian Indonesia Jenis-Jenis Pengangguran," *J. Ris. Ekon. dan Akunt.*, vol. 2, no. 3, pp. 34–42, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/download/2123/2214/8903>
- [7] I. D. Oktavia, Refalinda Hayu Seantemat Maurany, D. A. R. Palupi, F. A. Laffaysza, M. W. Agustino5, and A. N. Hidayati, "Hubungan Inflasi Dan Pengangguran Dalam Ekonomi Islam," *J. Stud. Multidisipliner*, vol. 8, no. 12, pp. 564–572, 2024, [Online]. Available: <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jsm/article/view/7353>

- [8] A. . K. A. Ni Komang Sopianti, "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT INFLASI, DAN UPAH MINIMUM TERHADAP JUMLAH PENGANGGURAN DI BALI," *E-Jurnal EP Unud*, vol. 2, no. 4, pp. 216–225, 2022, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/44610-ID-pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-tingkat-inflasi-dan-upah-minimum-terhadap-jumlah-pe.pdf>
- [9] S. Pasuria and N. Triwahyuningtyas, "PENGARUH ANGKATAN KERJA, PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA," *J. Bid. Ilm. Sos. Ekon. budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 1, no. 6, pp. 795–808, 2022, [Online]. Available: <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/94>
- [10] A. Susanti, D. Yohanna, A. P. Sitorus, S. N. Shaumy, M. D. Stis, and D. Ayu, "Analisis Dampak Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Kota Bogor," *J. Pendidik. Ekon. dan Kewirausahaan Vol.*, vol. 1, no. 1, pp. 107–113, 2024, [Online]. Available: <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/77>
- [11] S. Frisnoiry, H. M. W. Sihotang, N. Indri, and T. Munthe, "Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia," *J. Ilm. KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, vol. 17, no. 1, 2024, [Online]. Available: <https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/1866>
- [12] Fitrawaty, R. D. B. Malau, R. F. Yusrina, Christianto, Ginting, and E. Simbolon, "PENGANGGURAN DI INDONESIA: PENYEBAB, DAMPAK, DAN SOLUSI," *J. Stud. Multidisipliner*, vol. 10, no. 4, pp. 124–129, 2026, [Online]. Available: <https://sejurnal.com/pub/index.php/jsm/article/view/313>
- [13] H. Riofita, "Memacu Kesiadaan Mahasiswa Merekomendasikan Jurusan Pendidikan Ekonomi," *J. Pendidik. Ekon. dan Kewirausahaan Vol.*, vol. 6, no. 1, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EKLETIK/article/view/22803>
- [14] M. I. A. Mokoagow and A. Mardiana, "DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI GORONTALO," *Edunomika*, vol. 8, no. 1, pp. 1–8, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/10650/pdf>
- [15] H. Riofita, "Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech," *J. Ekon. Indones.*, vol. 13, no. 2, pp. 137–151, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.isei.or.id/index.php/isei/article/view/353>
- [16] K. R. Doni Rahman, "EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA STUDI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI," *J. Kaji. Pemerintah*, vol. 7, pp. 39–53, 2021, [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/361385825_Efektivitas_Kebijakan_Pemerintah_Tentang_Pengembangan_Kompetensi_Kerja_Melalui_Program_Kartu_Prakerja_Studi_Program_Kartu_Prakerja_Dalam_Mengatasi_Pengangguran_Di_Kabupaten_Tebo_Pr ovinsi_Jambi](https://www.researchgate.net/publication/361385825_Efektivitas_Kebijakan_Pemerintah_Tentang_Pengembangan_Kompetensi_Kerja_Melalui_Program_Kartu_Prakerja_Studi_Program_Kartu_Prakerja_Dalam_Mengatasi_Pengangguran_Di_Kabupaten_Tebo_Provinsi_Jambi)
- [17] Suriadi, K. Dewi, A. Krisdiyanto, I. K. Sukarma., and Sriyono, "Mengatasi masalah pengangguran melalui pelatihan keterampilan berbasis komunitas," *Communnity Dev. J.*, vol. 4, no. 4, pp. 8448–8454, 2023, [Online]. Available: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/19686/14342>
- [18] H. Riofita, "Predicting Muslim Female Customer Retention Through Islamic Marketplace Attractiveness," *J. Islam. Econ. Bus. Res.*, vol. 4, no. 2, pp. 234–247, 2024, [Online]. Available: <https://jiebr.umy.ac.id/index.php/jiebr/article/view/282>